DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Kerangka Pemikiran 8
F. Metode Penelitian 17
1. Pendekatan Masalah 18
2. Spesifikasi Penelitian 19
3. Sumber dan Jenis Data 20
4. Teknik Pengumpulan Data 23
5. Teknik Analisis Data 24
G. Orisinalitas Penelitian 26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 28
A. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 28

1. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)..... 28
2. Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 30
3. Daerah Kerja dan Formasi Perjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 33
4. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 35
5. Pemberhentian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)..... 42
B. Tinjauan Umum Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 44
1. Pengertian Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)..... 44
2. Objek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 45
3. Subjek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 47
4. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)..... 47
5. Dasar Pengenaan Pajak, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), dan Tarif Pajak..... 48
6. Saat Terutangnya Pajak..... 50
C. Tinjauan Umum Tentang Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) 52
D. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Profesi..... 52
E. Tinjauan Umum Tentang Teori Penegakan Kode Etik..... 54
F. Tinjauan Umum Tentang Teori Tanggung Jawab 55
G. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum 56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 58
A. Penegakan Kode Etik Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Organisasi IPPAT di Kota Semarang..... 58
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 58
2. Penegakan Kode Etik Tentang Pendaftaran Tanah Oleh Organisasi IPPAT di Kota Semarang..... 63
B. Hambatan Dalam Penegakan Kode Etik Terhadap Anggota Organisasi IPPAT Kota Semarang..... 73
C. Konsep Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Sistem Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) 77

BAB IV PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA .....
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Daftar Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang

Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah

Gambar 2 : Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerimaan Hak Tanah dan/atau Bangunan